

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH/LAHAN
DI WIALAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
BANGKO PUSAKO**

Oleh: Adil Sembiring

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jalan Beringin, Gang Alkhalis, Gobah

Email: adil.sembiring@hotmail.com - Telepon : 085278365460

ABSTRACT

Criminal acts of deception is one of the conventional crime continues to grow in the community, especially the deceptions sale of land in the Police Sector Bangko Pusako region which continued to increase from time to time. This is caused by the increasing population of the Indonesian people that the demand for land increased. Economic needs of the community that are not offset by an increase in welfare by the government is also a contributory factor on the criminal fraud cases this land purchase. In a criminal case the police have an important role as the spearhead of the laws are made in the form of acts of investigation. Investigation is a process of revealing the facts and the evidence for the occurrence of a crime and finding criminal suspects. Investigations were carried out police often encounter obstacles, it is motivated lack of public trust in the police and collisions that occur between the existing legal rules with the rule of law in the society.

Keywords : Investigation-Deception-Sale of land

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini tidak dibarengi dengan peningkatan ekonomi masyarakat oleh pemerintah, sehingga terjadi ketidakstabilan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ketidakstabilan ini ditandai dengan maraknya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, baik konvensional maupun inkonvensional. Ini merupakan akibat dari kebutuhan ekonomi yang terus meningkat namun semakin sempitnya lahan sebagai tempat masyarakat untuk bekerja mencari nafkah maupun sebagai lahan untuk tempat tinggal. Hal ini meningkatkan intensitas eksploitasi hutan di Indonesia secara tidak terkendali untuk dijadikan lahan perkebunan maupun tempat tinggal. Eksploitasi hutan menjadi lahan ini merupakan salah satu contoh tindak pidana yang kini marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, yaitu tindak pidana kehutanan. Hal ini juga ditunjang oleh kultur masyarakat Indonesia secara umum dan Riau secara khusus adalah bertani maupun berkebun.

Salah satu daerah yang marak terjadi tindak pidana kehutanan adalah Kecamatan Bangko Pusako. Kecamatan Bangko Pusako merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Di wilayah ini, masih terdapat banyak sekali hutan yang dieksploitasi oleh masyarakat secara tidak terkendali. Tindak pidana kehutanan yang terjadi ini merupakan hulu dari tindak pidana lain yang saling berkaitan di Kecamatan Bangko Pusako, karena hutan yang telah ditebang dan diambil kayunya akan menjadi tanah/lahan kosong yang kemudian akan dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat sekitar dengan mengurus segala administrasi ke pemerintah terkait. Setelah tanah/lahan

tersebut dimiliki, maka tanah/lahan tersebut akan menjadi objek ekonomi bagi masyarakat sekitar, biasanya akan dijual kepada pihak lain atau dimanfaatkan sendiri, namun yang paling sering terjadi adalah tanah/lahan tersebut akan dijual dan ditanami kelapa sawit.¹

Modus penipuan terhadap jual beli tanah/lahan yang kerap terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako adalah oknum warga masyarakat berpura-pura menjual sebidang tanah/lahan yang ia akui sebagai tanah miliknya. Kemudian ia menawarkan untuk dijual kepada orang lain. Dalam kasus-kasus ini pelaku penipuan sangat pintar berdalih agar mendapatkan sejumlah uang dari korban dengan rayuan-rayuan manis. Para pelaku penipuan ini juga mengajak korban untuk melihat tanah/lahan yang menjadi objek jual beli untuk lebih meyakinkan korban. Namun, setelah terjadi proses jual beli dan korban menyerahkan sejumlah uang, ternyata tanah/lahan yang menjadi objek jual beli bukanlah milik dari pelaku penipuan melainkan milik warga lain yang tidak ingin menjual tanah/lahan tersebut. Kasus tindak pidana penipuan ini, terus terjadi setiap tahunnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako, hanya saja dalam penyelesaian kasus ini masyarakat awam masih banyak menempuh jalur kekeluargaan, sehingga hukum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tentunya tidak memberikan efek jera kepada pelaku penipuan.²

¹ Wawancara dengan Bapak Ipda R.Ginting, SH Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

² Wawancara dengan Bapak Ipda R.Ginting, SH Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

Berbicara mengenai tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke II bagian XXV berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, karena sesungguhnya dalam bab ini diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang di tujukan terhadap harta benda yang mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau tipu muslihat,³ sedangkan penipuan dalam bentuk pokok diatur di pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378 yang berbunyi :⁴

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah Kepolisian Sektor Bangko Pusako membutuhkan suatu tahapan penyidikan yang intensif dari aparat kepolisian karena telah banyaknya masyarakat menjadi korban dan mengalami kerugian yang cukup besar. Penyidikan yang baik dari pihak kepolisian juga akan memberikan rasa percaya terhadap masyarakat untuk menyelesaikan perkara penipuan ini melalui jalur hukum yang benar, sehingga hukum dapat berjalan

sebagaimana mestinya. Sehingga penyidikan menjadi tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Disamping itu penyidikan suatu tindak pidana juga akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya, sehingga proses penyidikan ini memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: "***Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako.***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum kepolisian sektor Bangko Pusako?
2. Apa sajakah hambatan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum kepolisian sektor Bangko Pusako?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum kepolisian sektor Bangko Pusako?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum kepolisian sektor Bangko Pusako.

³ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 262.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal 261.

- b) Untuk mengetahui hambatan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum kepolisian sektor Bangko Pusako.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum kepolisian sektor Bangko Pusako.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b) Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan.
- c) Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam kasus penipuan jual beli tanah/lahan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.⁷ Menyeraskan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁵ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.¹⁰

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.¹¹ Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objectief strafrecht* sebagai peraturan hukum

positif yang merupakan hukum pidana.¹²

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹³ Teori pembalasan (*vergelding*) atau sering dikenal dengan sebutan teori absolut (mutlak), menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana—tidak boleh tidak—tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁵ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini juga bersifat *deskriptif* yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan

⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 181.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 82.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan suatu dasar pijakan bahwa kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut.¹⁷

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan. Hal ini dikarenakan masih cukup luasnya lahan yang belum di kelola, dan jumlah perpindahan penduduk kedalam Kecamatan Bangko Pusako setiap tahunnya terus meningkat sehingga menambah daya dorong untuk bertambahnya populasi penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan terhadap tanah/lahan sebagai tempat tinggal maupun sebagai mata pencaharian.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁸ Dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bangko Pusako;
- 2) Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako;
- 3) Pelaku Tindak Pidana Penipuan jual beli tanah/lahan;

- 4) Korban Tindak Pidana Penipuan jual beli tanah/lahan.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁹ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang diteliti. Tidak semua populasi akan dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan.

4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 76.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Persada Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.121.

²⁰ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari :

- a) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²¹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Unit Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan pelaku tindak pidana penipuan.
- b) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²²

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²³

Mayoritas masyarakat Kecamatan Bangko Pusako bermata

²¹ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95

²² *Ibid.*, hlm 100.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

pencaharian berkebun Kelapa Sawit. Harga tanah/lahan dari waktu ke waktu terus naik dan Kelapa Sawit menjadi komoditas utama perkebunan yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini disebabkan berkebun Kelapa Sawit sangat menjanjikan dan mudah dalam perawatannya. Sehingga bila ada warga yang akan menjual tanah/lahannya yang masih kosong, warga yang memiliki ekonomi cukup akan berlomba-lomba untuk membelinya.²⁴

Kebutuhan masyarakat terhadap tanah/lahan ini terus meningkat dari tahun ke tahun, proses jual beli tanah/lahan di wilayah Bangko Pusako inipun sangat rumit. Seseorang yang akan menjual sebidang tanah/lahan yang cukup luas miliknya akan menyuruh beberapa orang untuk menjadi perantara sebagai orang yang mencari pembeli, dan setiap penjualan maka perantara ini akan mendapatkan komisi.²⁵

Menjadi perantara penjualan tanah/lahan ini mempunyai komisi yang cukup menjanjikan. Namun, akhirnya membuat banyak masyarakat menjadikan hal ini sebagai mata pencaharian utama. Orang yang menjadi perantara dari hari kehari semakin banyak sementara jumlah tanah yang akan diperjual belikan semakin sedikit, ini menjadi celah terhadap maraknya penipuan jual beli tanah/lahan.²⁶

Kasus penipuan jual beli tanah/lahan yang marak terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Bangko Pusako merupakan kejahatan konvensional yang terjadi akibat pergeseran ekonomi yang terus meningkat pesat dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, sementara kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu dan memang sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah ia miliki, ingin terus menambah dan terus menambah.²⁷ Hal ini tentu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dalam *Anomie Theory*, ia menyatakan bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, “*insatiable and bottomless abyss*” (jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar).²⁸

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyidikan harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.²⁹ Adapun penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang

²⁴ Wawancara dengan *Yahman* Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan, Hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

²⁵ Wawancara dengan *Musdar Rozikin* Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan, Hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

²⁶ Wawancara dengan *Ahmad Jais* Pelaku tindak Pidana penipuan Jual Beli Tanah/Lahan, Hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Chaverius* Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 60.

²⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum*, Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :³⁰

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga disebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap yang meliputi :³¹

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar Perkara
6. Penyelesaian berkas perkara
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
8. Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
9. Penghentian penyidikan.

Kasus penipuan jual beli tanah/lahan sebenarnya sangat banyak sekali terjadi di wilayah Kepolisian Bangko Pusako, hanya saja masyarakat masih banyak awam terhadap aturan hukum yang berlaku. Di samping itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian sebagai lembaga yang melindungi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap lancarnya penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum Kepolisian Bangko

Pusako ini. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan perkara penipuan ini melalui jalur kekeluargaan dengan berdamai, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini tentu berimbas terhadap terus maraknya kasus serupa.³²

2. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako

Dari rumusan masalah yang pertama tentang penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di Wilayah Kepolisian Sektor Bangko Pusako dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya penyidikan tersebut. Sesungguhnya dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup ditengah masyarakat diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian.

Durkheim dalam teorinya *Anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai) meyakini bahwa perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.³³

Segenap aparat Kepolisian Sektor Bangko Pusako terus meningkatkan kinerja dalam hal penanganan kasus

³⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³¹ Pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

³² Wawancara dengan Bapak Brigadir Z. Barus Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 59.

penipuan jual beli tanah/lahan ini, untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat dan terciptanya kedamaian di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya kasus yang dapat diungkap dari tahun ketahun, sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 setidaknya telah terungkap 11 kasus penipuan jual beli tanah/lahan ini. Namun, peningkatan ini bukan berarti tidak adanya hambatan yang terjadi, beberapa hambatan yang ada diantaranya:³⁴

1) Faktor Kurangnya Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Sektor Bangko Pusako

a. Faktor kuantitas personil

Wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako ini cukup luas, tingkat kepadatan penduduknya pun dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan Kecamatan Bangko Pusako merupakan daerah yang sedang berkembang, dan terdiri dari suku yang bermacam-macam, kemudian juga ditunjang masih banyaknya tanah/lahan kosong yang bisa dimanfaatkan menyebabkan setiap tahun terus ada pendatang yang masuk. Pendatang yang masuk ke wilayah Bangko Pusako ini mempunyai harapan untuk dapat merubah taraf kehidupannya lebih baik, namun pada kenyataannya kehidupan yang ada di Bangko Pusako tidak semudah yang mereka pikirkan. Akibat dari hal ini adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang menjadi dasar penyebab terus berkembangnya tindak pidana yang terjadi.³⁵

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Ipda R.Ginting, SH* Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Agustami* Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor

Tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan ini merupakan satu dari berbagai tindak pidana yang marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako. Banyaknya tindak pidana yang terjadi ini tidak diimbangi dengan jumlah personil kepolisian, hal ini menjadi salah satu penghambat terhadap kelancaran dan maksimalnya penyidikan tindak pidana penipuan ini.³⁶

Rasio jumlah personil kepolisian dengan masyarakat juga tidak ideal. Meskipun ada penambahan personil dalam jangka waktu tertentu, namun jumlahnya tidak signifikan sehingga ini merupakan catatan penting untuk dibenahi kedepannya. Tidak idealnya rasio kepolisian dengan masyarakat merupakan hal yang cukup penting untuk menekan tingkat kejahatan yang ada untuk menciptakan masyarakat yang aman.³⁷

b. Faktor kualitas personil

Selain faktor kuantitas atau jumlah personil yang masih kurang di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako, faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kualitas dari personil yang ada. Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana

Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Riduan Pane* Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

³⁷ Wawancara dengan *Bapak Ipda R.Ginting, SH* Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana penipuan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional.

Untuk mengatasi hal seperti ini, maka personil kepolisian harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan dan pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Tidak hanya itu, pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Terutama, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik maupun penyidik pembantu dapat berjalan lancar dan mampu mengungkap kebenaran materil yang ada.³⁸

2) Faktor kurangnya partisipasi dari masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako

Hukum positif berfungsi sebagai rekayasa masyarakat yang dibuat dan diberlakukan bagi warga masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Namun, hukum positif yang ada tidak seutuhnya dapat diberlakukan secara maksimal sesuai dengan tujuan

aturan tersebut dibuat. Hal ini merupakan efek dari masyarakat multikultural yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri berbagai macam adat, sistem, budaya, suku, kebiasaan, nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat dan politik yang dianut berbeda-beda satu sama lain. Sehingga, sering menimbulkan benturan antara hukum positif yang dibuat dan diberlakukan oleh negara dengan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Partisipasi dari masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sangat dibutuhkan. Namun, sinkronisasi antara masyarakat dan pihak kepolisian belum menemukan titik temu. Harus ada kerja sama yang baik antara kepolisian dengan masyarakat agar tindakan yang dilakukan oleh kepolisian menjadi maksimal. Tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat akan semakin berkembang apabila tidak dilakukan penindakan yang benar terhadap pelaku dari kepolisian. Tentunya, semakin berkembangnya tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan ini akan sangat merugikan masyarakat sendiri.³⁹

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga menunjang tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako ini merupakan kelompok masyarakat yang masih menganggap bahwa polisi adalah sosok yang menakutkan, dan apabila berurusan

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ipda R.Ginting, SH Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Z. Barus Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

dengan polisi maka perkara akan semakin sulit terselesaikan dan berbelit-belit. Pola pikir demikian, hendaknya harus dapat dihapuskan oleh masyarakat, kepolisian adalah teman dan pengayom bagi masyarakat. Kepolisian terus bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat. Namun, akibat dari pola pikir ini, masyarakat menjadi lebih memilih cara perdamaian yang dianggap praktis dan cepat.⁴⁰

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian ini, merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko cukup potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Pemberantasan terhadap tindak pidana merupakan tugas dan tanggung jawab dari semua warga negara Indonesia. Kepolisian Sektor Bangko Pusako tidak akan mampu bekerja secara maksimal dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan yang terjadi jika tidak mendapat dukungan dan peran aktif dari masyarakat.⁴¹

3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Brigadir Agustami Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ipda R.Ginting, SH Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Rabu, Tanggal 8 Agustus 2014, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan menekan perkembangan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako.⁴² Pihak kepolisian mempunyai kewenangan yang telah diatur di dalam undang-undang yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum masyarakat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Bangko Pusako dalam mencegah dan menekan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan adalah:⁴³

1) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan Kepolisian Sektor Bangko untuk mencegah, menanggulangi atau mengurangi terjadinya tindak pidana. Tindakan yang dilakukan diantaranya :

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk;
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

2) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat dari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan cara mencatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Upaya represif ini dilaksanakan melalui penindakan-penindakan

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan.

Selain upaya yang dilakukan diatas pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako juga melakukan berbagai upaya lain diantaranya :⁴⁴

- 1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Sektor Bangko Pusako

Kepolisian Sektor Bangko Pusako terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Sektor Bangko Pusako untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.

Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya terutama penyidikan.

- 2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako

Paradigma baru yang sedang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat, dengan berbasis pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat. Paradigma ini

juga yang akan dikembangkan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako. Dengan paradigma baru ini diharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat.

Cara yang ditempuh untuk menciptakan paradigma ini iyalah dengan lebih seringnya polisi tampil di masyarakat secara baik, dan membina tali silaturahmi dengan baik pula. Tampilnya polisi ditengah masyarakat ini bisa melalui penyuluhan yang dilakukan secara rutin ke desa-desa di wilayah Kepolisian Sektor Bangko Pusako. Karena dari penyuluhan ini, masyarakat akan merasa dekat dengan kepolisian sehingga menghilangkan persepsi masyarakat bahwa intansi kepolisian yang tidak baik. Posisi adalah pelayan masyarakat, sehingga polisi harus senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sesuai dengan Tri Batra Kepolisi poin ketiga.

Pembinaan yang dilakukan terhadap personil Kepolisian Sektor Bangko Pusako berupaya menciptakan rasa empati. Rasa empati ini berarti seorang polisi menempatkan dirinya sebagai masyarakat biasa. Dengan demikian, polisi tidak hanya akan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, tapi juga akan mengenal lebih detail tipe-tipe masyarakat yang berbeda yang berada di wilayah tugasnya.

Dengan semua upaya ini, diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya Kepolisian Sektor Bangko Pusako dalam memberantas tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, terjalin sinkronisasi yang baik antara

⁴⁴ *Ibid.*

kepolisian dengan masyarakat. Kepolisian dapat bekerja secara maksimal dan masyarakat dapat hidup aman dan tentram.

G. Penutup

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak kasus yang belum dapat terungkap dan terus meningkatnya jumlah kasus penipuan setiap tahunnya.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako adalah minimnya jumlah personil, rendahnya kualitas personil dan rendahnya partisipasi masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan di wilayah Kepolisian Sektor Bangko Pusako adalah dengan berusaha meningkatkan jumlah personil yang ada secara berkala, dan meningkatkan kualitas personil dengan terus mengadakan pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan personil, wawasan dan pengetahuan tentang delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya terutama penyidikan. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui paradigma baru yang sedang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini yang berorientasi kepada pemecahan

masalah-masalah masyarakat, dengan berbasis pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat, serta meningkatkan empati personil Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

2. Saran

- a. Kepolisian Sektor Bangko Pusako harus terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani setiap kasus yang ada, terutama dalam melaksanakan penyidikan. Penyidikan harus dapat benar-benar dilaksanakan secara maksimal, karena penyidikan merupakan dasar dari setiap tindak pidana yang akan menjadi acuan ketahap berikutnya. Terutama dalam tindak pidana penipuan yang terus marak terjadi, apabila terjadi kesalahan atau tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan, maka akan berakibat fatal terhadap penuntutan nantinya. Sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penipuannya yang lain.
- b. Kepolisian Sektor Bangko Pusako harus terus berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat, karena semakin pesatnya teknologi dan informasi sejalan dengan peningkatan tindak pidana yang terjadi dan semakin canggih pula tindak pidana yang terjadi.
- c. Peningkatan kualitas personil Kepolisian Sektor Bangko Pusako tidak hanya terbatas pada peningkatan kemiliteran saja, karena ini akan membuat kepolisian terus dianggap sebagai suatu instansi yang egois dan emosional. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat masing-masing anggota kepolisian dituntut harus

juga dapat mengendalikan emosinya dan pembinaan rasa empati yang ditanamkan harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak sekedar formalitas.

- d. Kerjasama yang sinkron antara masyarakat dengan kepolisian harus terus ditingkatkan, karena kepolisian merupakan mitra masyarakat. Kerja sama yang baik dapat tercipta apabila antara kepolisian dan masyarakat sama-sama merasa nyaman dalam hidup berdampingan. Sehingga, setiap terjadinya tindak pidana kepolisian dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik untuk mengungkapnya.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo, R. , 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal De Pasal*, Politeia, Bogor.
- Baringbing, RE, 2001, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1990, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Persada Raja Grafindo, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum, Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012.